

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKTA KEMATIAN PADA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA  
BUKITTINGGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi  
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

**OLEH:**

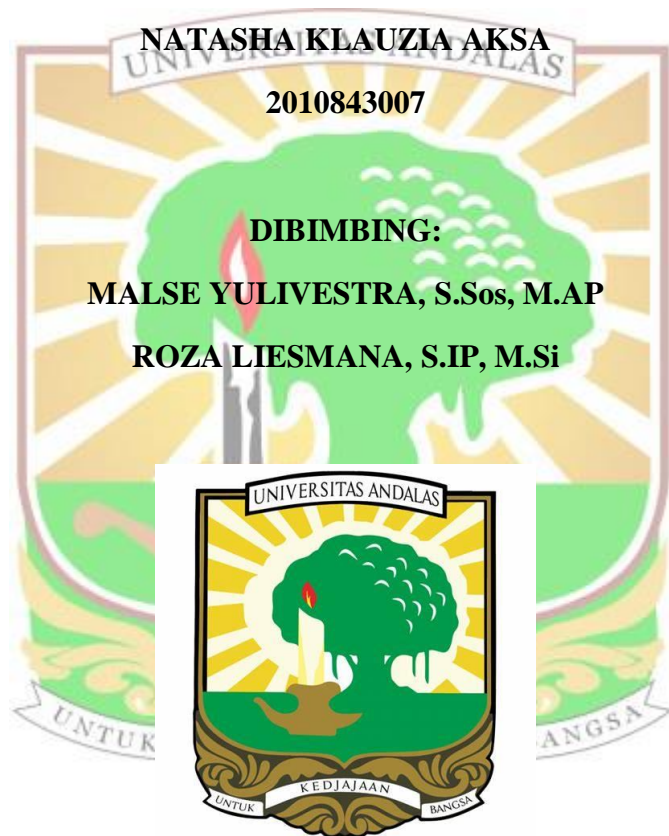
**NATASHA KLAUZIA AKSA**

**2010843007**

**DIBIMBING:**

**MALSE YULIVESTRA, S.Sos, M.AP**

**ROZA LIESMANA, S.IP, M.Si**



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

## ABSTRAK

**Natasha Klauzia Aksa, 2010843007, Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, 2024. Dibimbing oleh: Malse Yulivestra, Sos, M.AP dan Roza Liesmana, S.IP, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 159 halaman dengan referensi 13 buku teori, 6 buku metode, 8 artikel jurnal, 4 skripsi, 5 Undang-Undang dan Peraturan, dan 5 website internet.**

Studi ini bermaksud guna mendeskripsikan serta menganalisis Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi. Kajian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya beberapa masyarakat yang belum mengurus Akta Kematian setelah diterbitkan Surat Keterangan Kematian oleh kelurahan dan rumah sakit.

Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Pemilihan informan dengan menggunakan pendekatan purposive sampling. Metode keabsahan data memakai triangulasi sumber. Teori George C. Edward III digunakan dalam studi ini yaitu struktur birokrasi, disposisi, sumber daya, dan komunikasi.

Berdasarkan temuan studi yang ditemukan dilapangan disimpulkan bahwasanya Implementasi Kebijakan Akta Kematian pada Disdukcapil Kota Bukittinggi belum terlaksana secara optimal. Meskipun Kebijakan Akta Kematian telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi sejak tahun 2010. Namun efektivitas dari kebijakan tersebut masih belum terpenuhi. Berikut beberapa faktor penghambat yaitu pelaksanaan Akta Kematian sudah disampaikan, dipahami dan diterima jelas oleh setiap implementor baik internal maupun eksternal. Hanya saja Buku Pokok Pemakaman yang diberikan oleh Disdukcapil kepada kelurahan masih ditemukan beberapa kelurahan tidak lagi menerapkannya. Kemudian ketersediaan staff yang kurang memadai sehingga membatasi kegiatan jemput bola ke kelurahan. Tak hanya itu fasilitas yang kurang memadai dan mengalami kerusakan. Selanjutnya tidak adanya pengangkatan staff khusus untuk menangani Akta Kematian dan pemberian insentif tidak dilakukan karena tidak adanya anggaran khusus. Terakhir adanya keterlibatan OPD yaitu RT, RW dan Kelurahan dalam peningkatan pelaporan peristiwa kematian dan cakupan kepemilikan Akta Kematian dengan melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dan memberikan Buku Pokok Pemakaman. Namun Disdukcapil sudah lama tidak melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian dan masih ditemukan kelurahan yang tidak menerapkan Buku Pokok Pemakaman. Dimana Buku Pokok Pemakaman juga tidak berfungsi sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selain itu, RT dan RW kesulitan dalam melaporkan peristiwa kematian karena masyarakat enggan melaporkan kematian.

**Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akta Kematian.**

## ABSTRACT

**Natasha Klauzia Aksa, 2010843007, Implementation of the death certificate policy by the Population and Civil Registration Office of Bukittinggi Regency, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, 2024. Supervised by: Malse Yulivestra, Sos, M.AP and Roza Liesmana, S.IP, M.Si. This thesis consists of 159 pages with references to 13 theory books, 6 method books, 8 journal articles, 4 theses, 5 regulations, and 3 internet websites.**

The purpose of this research is to describe and analyze the Implementation of the Death Certificate Policy at the Population and Civil Registration Office of Bukittinggi City. Civil Registration Office of Bukittinggi City. This study is motivated by the fact that there are still there are still some people who have not taken care of the Death Certificate after the Death Certificate issued by the village and hospital.

This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive research design. Interviews, observations, and documentation were used to collect data. Selection of research informants using a purposive sampling approach. The data validation method used source triangulation. George C. Edward III's theory was used in this study namely bureaucratic structure, disposition, resources, and communication.

Based on the results of research found in the field, it is concluded that the Implementation of the Death Certificate Policy at the Bukittinggi City Disdukcapil has not been carried out optimally. Although the Death Certificate Policy has been implemented by the Bukittinggi City Government since 2010. However, the effectiveness of this policy has not yet been achieved. Several inhibiting factors include that the implementation of the Death Certificate has been communicated, understood, and clearly accepted by all implementers, both internal and external. However, the Funeral Register Book provided by Disdukcapil to the sub-districts is still not being applied in some areas. Additionally, the availability of staff is insufficient, limiting the proactive death registration activities in the sub-districts. There are also inadequate facilities, some of which are damaged. Furthermore, there has been no appointment of specific staff to handle Death Certificates, and incentives are not provided due to the lack of a special budget. Finally, there is involvement from OPDs, such as RT, RW, and the Kelurahan, in improving the reporting of deaths and the coverage of Death Certificates by conducting proactive death registration services and providing the Funeral Register Book. However, Disdukcapil has not been providing proactive death registration services for a long time, and some sub-districts still do not implement the Funeral Register Book. The Funeral Register Book is also not functioning as intended. In addition, RT and RW face difficulties in reporting deaths because the community is reluctant to report them.

**Keywords: Implementation, Policy, Death Certificate.**